

DIPLOMASI INDONESIA DALAM MENGAKHIRI SANKSI FIFA TAHUN 2015

Tibortius Melkior Saceira¹
NIM. 1302045241

Abstract

This study aim to determine and describe Indonesia diplomacy to end FIFA suspended in 2015. This type of research is descriptive, because the author describes Indonesia to used multi-track diplomacy for end suspended given by FIFA. This study used secondary data obtained by the literature review such as books, the Media of Internet, and other literature. The data collection techniques used literature studies or research of library, with books, documents, etc, that are needed by the author. The Data analysis technique using is qualitative analysis. The result showed that Indonesia government's interference in Indonesia Football Association (PSSI) internal problem to freeze PSSI the highest organization football in Indonesia the impact is Indonesia's to obtain suspended by FIFA. In resolve the problem Indonesia used multi-track diplomacy. Indonesia used three track, first to pass by the government make meeting with FIFA, second to pass by the citizen to execute demonstratitonto government that the citizen need football back and last to pass by the media to help connected to government and FIFA.

Keywords : *Suspended FIFA, PSSI, Indonesia*

Pendahuluan

PSSI (Persatuan Sepakbola seluruh Indonesia) sebagai salah satu organisasi olahraga yang didirikan pada masa penjajahan Belanda, merupakan organisasi tertinggi yang mengatur tentang sepakbola di Indonesia yang dibentuk 19 April 1930 di Yogyakarta. PSSI di dirikan oleh seorang insinyur bernama Soeratin Sosrosoegondo (<http://www.pssi.or.id>). Pada tahun 1952, PSSI bergabung bersama FIFA (Fédération Internationale de Football Association), FIFA sendiri adalah organisasi yang mengatur tentang sepakbola internasional. FIFA didirikan pada tanggal 21 Mei 1904 di Perancis, FIFA berpusat di Zurich, Swiss (<http://bola.inilah.com>). PSSI selalu mengadakan kompetisi sejak tahun 1931, pada awal terbentuknya PSSI kompetisi atau liga pertama yang dibuat oleh PSSI adalah liga yang bernama Liga Perserikatan. Selanjutnya ada Liga Galatama (Liga Sepak Bola Utama) yang sejak tahun 1979 sudah diperkenalkan. Sama seperti Liga Perserikatan kompetisi di Liga Galatama berakhir pada tahun 1993-1994 (www.viva.co.id).

¹ Mahasiswa Program S1 Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: ekysaceira@gmail.com

Permasalahan yang menjadi titik awal PSSI mendapatkan sanksi yaitu tepatnya pada tanggal 13 Agustus 2007, Ketua Umum Nurdin Halid divonis dua tahun penjara akibat tindak pidana korupsi dalam pengadaan minyak goreng. Menurut standar statuta FIFA Pasal 32 Ayat 4 “The members of the Executive Committee must not have been previously found guilty of a criminal offence” (<http://sport.detik.com>) yang berarti seorang pelaku kriminal dilarang menjabat sebagai ketua umum sebuah asosiasi sepakbola nasional. Masalah selanjutnya yang terjadi di dalam PSSI adalah dualisme liga yang terjadi tepatnya pada bulan Oktober 2010 akibat didirikannya LPI (Liga Primer Indonesia) yang tidak mendapat pengakuan dari badan tertinggi sepakbola internasional yaitu FIFA sehingga mengganggu kompetisi dari liga sebelumnya yaitu ISL (Indonesia Super Liga).

Pada 1 April 2011, Komite Darurat FIFA memutuskan untuk membentuk Komite Normalisasi untuk menggantikan Nurdin Halid, ini adalah tahapan pertama yang dilakukan FIFA. Selanjutnya, FIFA mengangkat Agum Gumelar sebagai Ketua Komite Normalisasi PSSI dalam Kongres Luar Biasa tanggal 9 Juli 2011 di Solo, Djohar Arifin Husin terpilih sebagai Ketua Umum PSSI periode 2011-2015. Namun kurang satu periode kepemimpinannya terjadi kebijakan yang bersifat kontroversi. Dampaknya empat anggota eksekutif dipecat, kemudian mereka membentuk organisasi tandingan yaitu KPSI (Komite Penyelamat Sepakbola Indonesia). Kemudian pihak KPSI melaporkan pengaduan ini kepada CAS (Court of Arbitration for Sport), AFC (Asian Football Confederation) dan FIFA (Fédération Internationale de Football Association) selaku badan organisasi tertinggi yang mengatur sepak bola Internasional.

Berawal pada pertengahan Februari 2015 dari rencana PSSI menggelar QNB League (Qatar National Bank), Badan Olahraga Profesional Indonesia (BOPI) yang berada di bawah naungan pemerintah menyarankan PSSI menunda kick off QNB League. Karena ada dua klub yang tidak memenuhi syarat administrasi yaitu Arema Cronus dan Persebaya Surabaya. Akhirnya PSSI setuju untuk menunda kick off QNB League. Namun FIFA menyetujui QNB League jalan dengan 18 klub. Dengan persetujuan dari FIFA maka kick off QNB League akan tetap dilaksanakan pada tanggal 4 april namun dengan tetap memasukan Arema Cronus dan Persebaya Surabaya.

Karena PSSI dianggap melanggar aturan dari BOPI akhirnya kemenpora memberikan surat peringatan pertama pada PSSI, tertulis sesuai dengan pasal 122 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2007 tentang penyelenggaraan keolahragaan sebagai pelaksanaan kewenangan pemerintah. Kemenpora kembali memberikan surat peringatan kedua pada PSSI, Kemenpora menganggap PSSI tidak menghiraukan teguran tertulis pertama. Kemenpora akhirnya memberikan surat peringatan ketiga, karena PSSI tidak menghiraukan teguran menpora. Akhirnya pada tanggal 17 April 2015 PSSI pun dibekukan oleh menpora, dan pada tanggal 18 April 2015 PSSI membentuk KLB (Kongres Luar Biasa) dan PSSI memilih La Nyalla Matalitti sebagai ketua umum (<http://bola.liputan6.com>).

Akibat dari di bekukannya PSSI oleh menpora akhirnya FIFA sebagai badan tertinggi organisasi sepakbola memberikan sanksi terhadap PSSI di karenakan PSSI dianggap melanggar statuta FIFA dalam pasal 13, dan 17. Dalam statuta FIFA pasal 13 ayat 1

dijelaskan bahwa Seluruh anggota wajib mematuhi pertaruran dan pada ayat 1 poin dijelaskan setiap anggota FIFA harus menyelesaikan segala permasalahan secara independen dan memastikan tidak ada keterlibatan dari pihak ketiga. Selanjutnya dalam pasal satu ayat 2 ditulis jika anggota FIFA melanggar ayat 1 yang terdiri dari beberapa poin maka akan diberikan sanksi dan dalam pasal satu ayat 3 juga ditegaskan jika pelanggaran ayat 1 poin g, Jika ada pihak ketiga yang terlibat maka juga bisa berujung pada sanksi, namun itu bukanlah kesalahan federasi anggota FIFA. Dalam pasal 17 yang mengatur tentang kebebasan anggota FIFA dan turunannya, dalam ayat satu juga ditegaskan kembali dengan ditulis bahwa setiap anggota FIFA harus menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa ada pengaruh dari pihak ketiga.

Dalam dokumen yang dirilis FIFA, Sabtu 30 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Sekjen FIFA, Jerome Valcke, dalam dokumen tersebut disebutkan keanggotaan Indonesia di badan sepak bola dunia itu dicabut dan semua tim Indonesia (nasional maupun klub) dilarang melakukan aktivitas internasional termasuk berpartisipasi di kompetisi FIFA dan AFC. FIFA menganggap bahwa pemerintah Indonesia terlalu banyak ikut campur dalam masalah internal PSSI. FIFA menganggap pemerintah Indonesia melanggar statuta FIFA yaitu atas Pasal 13 dan 17 (www.solopos.com).

Akibat diberi sanksi oleh FIFA ada beberapa dampak internal yang dialami Indonesia diantaranya adalah FIFA menghentikan bantuan yang biasanya diberikan sebesar USD 250.000 kepada Indonesia untuk perbaikan sarana dan prasarana olahraga juga sebagai pembinaan pemain usia muda selanjutnya pemain dan wasit yang berasal dari Indonesia mengalami kerugian karena hilangnya mata pencarian mereka akibat tidak adanya kompetisi di Indonesia dan terakhir hilangnya sponsor akibat dibekukannya PSSI, perginya pemain asing untuk mengikuti kompetisi di negara lain menyebabkan daya tarik sepak bola di Indonesia semakin berkurang sehingga sponsor kurang tertarik berinvestasi di Indonesia.

Selain dampak internal yang di alami Indonesia ada juga dampak Eksternal atau dampak persepak-bolaan Indonesia dimata internasional, dampak – dampak tersebut adalah Indonesia di coret dari babak kualifikasi untuk ikut dalam Piala Dunia Rusia dan Piala Asia Uni Emirat Arab dan dibatalkan semua jadwal yang telah dibuat. Kedua Indonesia juga dicoret sebagai peserta dalam kompetisi AFC U-16 dan AFC U-19 dan Indonesia dikeluarkan dari kejuaraan regional wanita AFC U-14. Ketiga Indonesia juga tidak didaftar sebagai peserta kejuaraan futsal wanita AFC Malaysia 2015. Keempat Indonesia dibatalkan menjadi tuan rumah kejuaraan futsal AFC 2016 (kualifikasi zona AFF) dan digantikan oleh Uzbekistan 2016 yang menjadi tuan rumah. Kelima Dua klub Indonesia yang lolos ke babak 16 besar Persipura Jayapura dan Persib Bandung resmi dicoret dari Piala AFC 2015 dan terakhir selama hukuman diterapkan, Indonesia juga tidak mendapatkan program pembangunan AFC dan FIFA. Pejabat PSSI tidak diperbolehkan berpartisipasi dalam kursus pelatihan, seminar, atau lokakarya AFC atau FIFA (<http://m.tempo.com>).

Selama hukuman diterapkan, Indonesia juga tidak mendapatkan program pembangunan AFC dan FIFA. Pejabat PSSI tidak diperbolehkan berpartisipasi dalam kursus pelatihan, seminar, atau lokakarya AFC atau FIFA. Penelitian ini penting untuk dilakukan adalah karena pada zaman seperti ini sepakbola bukan hanya menjadi

sebuah olahraga saja melainkan menjadi suatu soft diplomacy bagi suatu negara untuk membentuk hubungan yang baik dengan negara lain yang dapat menciptakan perdamaian dunia yang menjadi salah satu tujuan dari Hubungan Internasional.

Kerangka Dasar Teori dan Konsep

Konsep Multi –Track Diplomacy

Multi-Track Diplomasi adalah jalur konseptual untuk melihat proses dari perwujudan perdamaian internasional. Itu terlihat pada alur yang menghubungkan bagian yang terpisah seperti (aktivitas, individual, institusi, dan komunitas) yang harus dijalankan bersama untuk mencapai satu tujuan yaitu perdamaian dunia. Konsep Multi-Track Diplomasi ini merupakan pengembangan dari Track pertama berupa Government, Track kedua berupa Non-Government yang menjelaskan paradigma dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir (Lousie Diamond dan John McDonald : 1996).

Multi-Track Diplomasi sendiri terdiri dari 9 jalur yang berbeda yaitu pertama *Government, Peacemaking through Diplomacy* yaitu pemerintah, atau perwujudan perdamaian melalui diplomasi. Artinya pembuatan kebijakan dan pembangunan perdamaian dilakukan dengan proses diplomasi resmi melalui aspek-aspek formal dari pemerintah untuk mencapai struktur, bentuk, dan mengatur sistem hubungan internasional dari waktu ke waktu untuk melindungi keamanan negara. Kedua *Nongovernment / Professional, Peacemaking through Conflict Resolution* Jalur kedua yaitu non-government atau orang yang profesional, mampu mewujudkan perdamaian melalui resolusi konflik. Ini menjadi kesempatan bagi para profesional non-pemerintah untuk menganalisa, mencegah, menyelesaikan, serta mengakomodasi konflik internasional dengan komunikasi, pemahaman, dan membangun hubungan baik dalam menghadapi masalah secara bersama-sama, oleh aktor-aktor bukan negara. Ketiga *Business, Peacemaking through Commerce* Jalur ketiga adalah Bisnis atau perwujudan perdamaian melalui perdagangan. Bisnis dapat menjalankan peran pasti dan potensial untuk membangun perdamaian melalui aspek ekonomi, persahabatan dan pemahaman internasional, saluran komunikasi informal, dan mendukung berbagai kegiatan perwujudan perdamaian.

Keempat *Private Citizen, Peacemaking through Personal Involvement* Jalur keempat adalah warga negara privat yang artinya mampu mewujudkan perdamaian melalui keterlibatan personal. Setiap individu warga negara akan berkontribusi dan turut serta dalam kegiatan pembangunan dan perdamaian. Hal ini bisa dilakukan dengan citizen diplomacy, program pertukaran, organisasi voluntary privat, adanya NGO dan berbagai kelompok kepentingan. Kelima *Research, Training, and Education, Peacemaking through Learning* Jalur kelima adalah penelitian atau pelatihan dan edukasi yakni perwujudan perdamaian melalui pembelajaran. Untuk ini, terdapat tiga kajian di dalamnya yaitu penelitian yang berhubungan dengan institusi pendidikan (sekolah, universitas), *think tanks* (berbagai penelitian, analisis, dan program studi) dan pusat penelitian kelompok yang berkepentingan khusus. Dengan kata lain ini adalah sebuah program pelatihan yang menyediakan keahlian praktisioner seperti negosiasi, mediasi, resolusi konflik, serta fasilitas *third-party* yang terdiri dari edukasi (pendidikan formal dari TK hingga program doktoral) yang mencakup beragam aspek global tentang studi lintas-budaya, studi tata dunia dan perdamaian, konflik analisis, serta manajemen dan resolusi Keenam *Activism, Peacemaking through Advocacy*

Jalur keenam adalah aktivisme atau perwujudan perdamaian melalui advokasi, dimana lebih menekankan pada aktivisme perdamaian dan environmental dalam hal *disarmament*, HAM, keadilan sosial dan ekonomi, serta advokasi terhadap kepentingan khusus mengenai kebijakan tertentu yang diambil pemerintah.

Ketujuh *Religion, Peacemaking through Faith in Action* Jalur ketujuh adalah agama yang menggambarkan perwujudan perdamaian melalui praxis kepercayaan. Di sini dipelajari bagaimana suatu kepercayaan dan kegiatan yang berorientasi perdamaian oleh komunitas-komunitas spiritual dan religius, serta beberapa gerakan berbasis moral seperti pacifisme (percaya bahwa resolusi konflik dengan jalan damai adalah yang paling benar), sanctuary (sebagai tempat yang dianggap suci dan mampu melindungi seseorang), dan anti-kekerasan. Kedelapan *Funding, Peacemaking through Providing Resources* Jalur kedelapan adalah pendanaan atau perwujudan perdamaian melalui penyediaan aset. Hal ini berhubungan langsung dengan komunitas-komunitas founding yakni baik yayasan maupun filantropis individual yang mampu menyediakan dukungan finansial untuk berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh jalur-jalur lain. Terakhir *Communications and Media, Peacemaking through Information* jalur terakhir ini adalah komunikasi dan media sebagai wujud perdamaian melalui informasi. Semua orang berhak menyuarakan opininya melalui media cetak, radio, film, sistem elektronik, bahkan seni.

Konsep Global Governance

Global Governane merupakan mekanisme atau sarana kerjasama bagi aktor baik negara maupun bukan negara untuk mengatasi masalah - masalah yang muncul sebagai konsekuensi dari globalisasi. Dalam kerangka ini, global governance jelas diasumsikan akan mengambil alih peran yang tidak lagi bisa dimainkan oleh negara-negara. Konsep global governance, sangat menarik bagi para profesional hubungan internasional karena dianggap menawarkan perangkat penyelesaian masalah-masalah global yang lebih efektif. Dalam artian ini, global governance mencakup ruang konseptual yang sangat luas yang bisa diisi oleh para ilmuwan maupun praktisi hubungan internasional.

Perdebatan antara kaum Realis dan Liberalis menjadi salah satu contoh. Dalam pandangan Realisme, hanya ada kesempatan kecil bagi negara untuk bekerja sama dan memiliki kemauan untuk membentuk suatu organisasi untuk keuntungan bersama. Dalam dunia yang penuh dengan kekacauan, tidak ada negara yang mau menolong negara lain tanpa mendapatkan keuntungan atau hanya untuk sekedar membantu mempertahankan keadaan negara tersebut, itulah teori yang diungkapkan oleh Realis.

Sedangkan kaum Liberalis memandang berbeda dengan apa yang telah di asumsikan oleh kamu Realis. Kaum Liberalis mengatakan bahwa kebebasan itu baik dan dapat membuka kesempatan bagi negara-negara untuk melakukan kerjasama. Menurut kaum Liberalis konflik dan perang merupakan konsekuensi dari kesalahan pemahaman antara negara satu dengan yang lain. Neoliberalisme merespon pendapat Neorealisme yang mengatakan bahwa struktur internasional hanya punya satu jalan keluar yaitu konflik dan perang. Kaum Liberalis mencoba membuat argumentasi berdasarkan gagasan Neorealis tentang “pencapaian” dan menciptakan perdebatan tentang

pencapaian mutlak dan relatif yang berakhir pada kesimpulan bahwa kerjasama dapat menyatukan negara-negara yang ada meskipun dengan keadaan dunia yang penuh dengan kelompok politik yang egois.

FIFA merupakan salah satu global governance yang berhasil menjadi suatu organisasi yang menyebarkan nilai-nilai kosmopolitanisme dalam bidang olahraga khususnya sepakbola. FIFA menolak diskriminasi dalam bentuk apapun yang ditulis pada statuta FIFA pasal 3 yang mengatakan bahwa “Diskriminasi yang dilakukan dalam bentuk apapun terhadap negara, individu atau kelompok karena ras, warna kulit, etnis, asal-usul kebangsaan, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, kekayaan, kelahiran atau status lainnya, orientasi seksual atau alasan lain sangat dilarang dan diancam hukum skorsing”. FIFA menganggap bahwa diskriminasi yang dilakukan dapat menghambat sepakbola (Muhammad Nizar Hidayat : 2015).

Keberhasilan FIFA dapat dilihat Dalam beberapa kasus, sepakbola menjadi barometer ideal dalam hubungan internasional, ketegangan antar bangsa, serta ambisi nasional. Sebagai contoh negara-negara yang baru merdeka langsung mencari legitimasinya dengan mengajukan syarat menjadi anggota FIFA (Federation International Football Association), yang jumlahnya lebih banyak dari pada anggota PBB atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (Dede Isharuddin : 2008).

Metode Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif. Dimana penulis menggambarkan fenomena yang terjadi di persepak-bolaan Indonesia sehingga di berikan sanksi oleh FIFA dan diplomasi yang dilakukan Indonesia untuk mencabut sanksi yang diberikan FIFA. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari penelaahan studi kepustakaan dan hasil browsing data melalui jaringan internet. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah telaah pustaka. Teknik analisis yang digunakan teknik analisis data kualitatif yaitu penulis menganalisis data sekunder yang kemudian menggunakan teori dan konsep untuk menjelaskan suatu fenomena atau kejadian yang sedang diteliti oleh penulis.

Hasil Penelitian

Konflik antara Pemerintah dan badan sepakbola tertinggi di Indonesia atau PSSI yang menyebabkan Indonesia terkena sanksi dari FIFA berupa dicabutnya hak anggota Indonesia oleh FIFA dan dilarangnya untuk mengikuti semua kompetisi dari FIFA, terjadi karena adanya campur tangan pemerintah Indonesia terhadap masalah internal PSSI. Akhir dari permasalahan tersebut yaitu dibekukannya PSSI oleh Menpora yang menganggap PSSI tidak merespon permintaan BOPI yang berada di bawah naungan Pemerintah. Akibat dari campur tangan pemerintah Indonesia terhadap masalah internal PSSI maka FIFA akhirnya memberikan sanksi kepada PSSI yang dirilis FIFA, Sabtu 30 Mei 2015 yang ditandatangani oleh Sekjen FIFA, Jerome Valcke karena melanggar statuta FIFA pasal 13 dan 17. Disanksinya Indonesia oleh FIFA menyebabkan Indonesia berupaya melakukan diplomasi kepada FIFA untuk mengakhiri sanksi yang diberikan oleh FIFA. Adapun dalam bab ini memberikan gambaran mengenai diplomasi apa saja yang digunakan Indonesia untuk membuat FIFA mengakhiri sanksi yang diberikan kepada Indonesia.

Upaya Internal dan Eksternal Indonesia Sebelum Menggunakan Multi-Track Diplomasi

Upaya internal dan eksternal disini yang diwakili Pemerintah dan PSSI dilakukan sebelum Indonesia diberikan sanksi oleh FIFA. Upaya eksternal dan internal dalam hal ini untuk menghindari sanksi atau mengakhiri permasalahan yang ada di dalam PSSI yaitu konflik antara PSSI dan FIFA. Berikut adalah upaya eksternal dan internal yang dilakukan oleh PSSI dan Pemerintah.

1. Upaya Internal

Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh Indonesia sebelum menggunakan Multi-Track Diplomasi dalam mengakhiri sanksi yang di berikan oleh FIFA. Setelah putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) yang membatalkan SK Menpora Nomor 01307 Tahun 2015 tentang Pembekuan PSSI. Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) La Nyalla Mahmud Mattalitti berupaya mengajak Menpora Imam Nahrawi berdamai. La Nyalla bahkan pergi bersama Presiden Direktur PT Liga Indonesia Syahril Taher ke Kantor Kempora untuk bertemu Menpora Imam Nahrawi, namun La Nyalla tidak bertemu dengan Menpora padahal Ketua Umum PSSI itu ingin mengajak dialog dengan duduk bersama tanpa berbicara soal hukum. Namun berdasarkan keputusan PNTU yang memenangkan PSSI Menpora menyatakan akan mengajukan banding (www.beritasatu.com).

Setelah upaya melalui pengadilan tidak menemui titik temu upaya lain juga dilakukan adapun upaya tersebut adalah dibuatnya pertemuan antara Menpora Imam Nahrawi dan perwakilan PSSI di Istana Wakil Presiden. Pertemuan tersebut membuat kisruh kedua kubu sedikit mereda. Bahkan, Menpora Imam Nahrawi berjanji mencabut pembekuan PSSI usai melaporkan pertemuan pada Presiden Joko Widodo. Menurut Penasehat Komite Olimpiade Indonesia (KOI) Agum Gumelar, jika organisasi PSSI diaktifkan kembali, maka Indonesia akan terhindar dari sanksi FIFA. Sanksi FIFA jelas merugikan Indonesia karena dampaknya tidak baik bagi persepak-bolaan nasional (www.bola.metrotvnews.com)

2. Upaya Eksternal

Dalam upaya eksternal ini PSSI sudah menduga bahwa FIFA akan memberikan sanksi kepada Indonesia khususnya PSSI oleh karena itu La Nyalla, yang baru saja terpilih lewat Kongres Luar Biasa (KLB) PSSI pada 18 April lalu menjelaskan bahwa ia telah meminta FIFA menanggukhan sanksi tersebut demi kebaikan sepakbola Indonesia. FIFA bahkan mengatakan jika PSSI memiliki jumlah suara yang lebih banyak ketimbang Menpora yaitu 92 suara banding 14 suara dan Presiden AFC juga mengatakan bahwa kepengurusan La Nyalla tidak dapat diganggu gugat. Namun Presiden FIFA saat itu yaitu Sepp Blatter memberikan masukan kepada PSSI agar terhindar dari sanksi FIFA.

FIFA meminta PSSI tulis surat kepada Menpora (Imam Nahrawi). Ingatkan bahwa kalau sampai Indonesia dibekukan, Indonesia tidak bisa ikut SEA Games, Pra-Piala Dunia, tidak bisa menjadi tuan rumah U-16, tidak bisa jadi tuan rumah U-19 dan Indonesia sendiri yang merasakan kerugiannya. FIFA sendiri memberikan waktu hingga 29 Mei 2015 namun pembekuan tetap diberikan

pemerintah dan akhirnya FIFA menjatuhkan sanksi kepada Indonesia (bola.inilah.com) Selain ketua umum PSSI melakukan upaya agar PSSI tidak terkena sanksi Menpora juga melakukan upaya agar Indonesia tidak diberikan sanksi oleh FIFA. Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) RI berupaya untuk membujuk FIFA agar tidak menjatuhkan sanksi kepada Indonesia (soccer.sindonews.com).

Multi-Track Diplomasi Indonesia untuk Mengakhiri Sanksi FIFA

Berdasarkan pendekatan Multi-Track Diplomasi terdapat Sembilan jalur atau track yang bias digunakan oleh suatu negara dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam hal ini Indonesia menggunakan 3 track atau jalur untuk mencabut sanksi yang diberikan FIFA. Adapun beberapa jalur atau track yang digunakan oleh Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Government, Peacemaking through Diplomacy

Diplomasi pertama yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia menggunakan diplomasi resmi melalui aspek-aspek formal dari pemerintah itu sendiri. Diplomasi yang dilakukan pemerintah pun terbagi menjadi tiga cara yaitu :

a. Diplomasi Melalui Presiden Indonesia

Akibat dari ikut campur tangan pemerintah Indonesia dalam masalah PSSI, Indonesia akhirnya mendapatkan sanksi dari FIFA. Untuk itu pemerintah Indonesia merasa bertanggung jawab atas sanksi yang diberikan FIFA pada Indonesia sehingga pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Presiden Indonesia yaitu Joko Widodo dan Menteri Pemuda dan Olahraga yaitu Imam Nahrawi akhirnya bertemu dengan delegasi FIFA dan AFC yang dipimpin anggota Exco FIFA dari Jepang Kohzo Tashima. Ikut serta pula beberapa anggota Exco lainnya Tengku Abdullah bin Sultan Ahmad Shah (Malaysia), Mariano Araneta (Filipina), dan FIFA Members Association Director, James Johnson. Di pihak AFC hadir Dato' Windsor John dan Sanjeevan Balasingam (www.cnnindonesia.com).

Pertemuan yang dilakukan oleh Presiden Indonesia, Joko Widodo bersama delegasi FIFA dan AFC yang dilakukan pada tanggal 2 November 2015 bermaksud untuk menyelesaikan masalah sepakbola yang ada di Indonesia. Dalam pertemuan tersebut membahas tentang permasalahan yang dialami PSSI yang tidak diketahui oleh FIFA. Selain itu dalam pertemuan tersebut FIFA juga memastikan bahwa pemerintah tidak membentuk komisi tandingan PSSI sebagai organisasi tertinggi sepakbola di Indonesia. Presiden Indonesia juga akan membentuk tim khusus yang akan berkomunikasi dengan FIFA. Ini adalah suatu perkembangan yang bagus yang dibuat oleh pemerintah Indonesia, karena selama ini pemerintah tidak pernah berkomunikasi dengan FIFA. Hasil terbaik dalam pertemuan antara presiden Indonesia bersama delegasi FIFA adalah pemerintah ingin membentuk tim khusus yang akan melakukan komunikasi terhadap FIFA terkait mencari solusi untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh PSSI. (<http://m.tempoco>).

b. Diplomasi Melalui Menpora

Dalam hal ini yang memiliki peran adalah Imam Nahrawi yang menjabat sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia. Imam Nahrawi memiliki kontribusi besar dalam pencabutan sanksi PSSI yang dilakukan oleh FIFA. Selain ikut bersama presiden Joko Widodo dalam pertemuan dengan delegasi FIFA dan AFC di istana negara Imam Nahrawi juga melakukan diplomasi langsung kepada presiden FIFA yang pada saat itu baru saja terpilih yaitu Gianni Infantino.

Imam Nahrawi mengambil momentum terpilihnya Gianni Infantino sebagai diplomasi untuk membuat FIFA mencabut sanksinya terhadap Indonesia. Imam Nahrawi mengirim surat kepada Gianni Infantino yang berisi ucapan selamat atas terpilihnya Gianni Infantino sebagai presiden baru FIFA setelah menggantikan presiden FIFA sebelumnya yaitu Sepp Blatter yang digantikan akibat kasus korupsi yang terjadi di badan sepakbola internasional tersebut (www.goal.com). Selain ucapan selamat yang ditulis oleh Imam Nahrawi dalam surat tersebut ditulis juga komitmen pemerintah Indonesia bersama federasi sepakbola yang terkait tetap bekerja sama sesuai dengan fungsi masing-masing, harapan bagi peningkatan kerja sama yang lebih baik antara Indonesia sebagai Pemerintah maupun nantinya federasi jika PSSI sudah tidak dibekukan lagi. Ketiga, tindak lanjut dari pernyataan Presiden Joko Widodo terkait rencana pengiriman utusan Indonesia ke FIFA dalam waktu secepat-cepatnya (www.goal.com).

c. Diplomasi Melalui Tim Khusus

Dalam hal ini orang yang memiliki ahli dalam permasalahan Indonesia akibat sanksi FIFA yaitu orang-orang yang menjadi tim khusus yang dikirim oleh pemerintah untuk bertemu dengan presiden FIFA. Tim khusus yang pergi bertemu dengan presiden FIFA adalah orang yang memiliki kompetensi dalam masalah sepakbola salah satunya adalah Erick Thohir yang sekarang menjabat sebagai Presiden FC Internazionale atau Inter Milan dan sebagai ketua umum Komite Olimpiade Indonesia (KOI) yang mewakili pemerintah. Sedangkan Agum Gumelar yang menjadi wakil dari komite Ad Hoc Reformasi PSSI yang pernah menjadi komite Normalisasi PSSI saat masa jabatan Nurdin Halid dan Ketua Umum PSSI dari tahun 1999-2003 (<http://superball.tribunnews.com>).

Pertemuan tersebut bermaksud untuk menyelesaikan sanksi FIFA sesegera mungkin dan dalam pertemuan tersebut menciptakan beberapa poin penting berkaitan dengan keberlangsungan PSSI dimata sepakbola internasional serta FIFA meminta pemerintah untuk mencabut pembekuan yang diberikan kepada PSSI . Selain Agum Gumelar dan Erick Thohir yang Asosiasi Pemain Profesional Indonesia (APPI) juga dilibatkan dalam tim khusus dibawah koordinasi FIFA. APPI yang diwakilkan oleh Punaryo Astaman bertemu dengan FIFA dengan tujuan utama untuk menemukan jalan keluar agar skors FIFA atas Indonesia segera dicabut (<http://bolaindo.com>).

2. *Private Citizen, Peacemaking Thought Personal Involvement*

Diplomasi yang kedua yang dilakukan oleh Indonesia adalah melalui warga negara yang artinya mampu mewujudkan perdamaian melalui keterlibatan personal. Setiap individu warga negara akan berkontribusi dan turut serta dalam kegiatan pembangunan dan perdamaian. Hal ini bisa dilakukan dengan citizen diplomacy, program pertukaran, organisasi voluntary privat, adanya NGO dan berbagai kelompok kepentingan.

Dalam hal ini masyarakat yang berperan dalam pencabutan sanksi FIFA adalah supporter atau pendukung sebuah klub. Hal tersebut dikarenakan sepakbola adalah salah satu hiburan utama hampir seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini terjadi dan jelas terlihat di Bandung, ribuan supporter klub sepakbola Persib Bandung atau yang sering disebut Viking melakukan aksi demo di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat kota Bandung. Viking atau Bobotoh ini menuntut agar pemerintah Indonesia harus segera mengakhiri permasalahan antara Menpora dan PSSI yang berujung disanksinya Indonesia oleh FIFA. Dengan adanya sanksi FIFA, seluruh klub dan timnas Indonesia tidak bisa berkompetisi di pertandingan internasional. Viking tidak ingin bangsa Indonesia yang berdaulat menjadi sebuah negara tanpa sepakbola didalamnya.

Berikut merupakan tuntutan Viking sebagai masyarakat Indonesia dan supporter sepakbola; satu Viking menuntut agar pemerintah menyadari bahwa sepakbola merupakan hiburan rakyat banyak yang harus segera diselamatkan. Kedua Viking menuntut sepakbola Indonesia harus bebas dari intervensi politik ataupun dari pihak ketiga lainnya. Ketiga Viking menuntut agar menpora dan ketua umum PSSI berpikir jernih dan melakukan etiked baik agsar bisa menyamakan visi dan misi. Keempat Viking menuntut Menpora, Imam Nahrawi untuk mencabut pembekuan terhadap PSSI agar sepakbola Indonesia dapat terlibat dalam sepakbola Internasional. Kelima Viking menuntut agar PSSI melakukan reformasi agar terbebas dari pengurus korupsi dan kepentingan politik. Keenam Viking menuntut agar kompetisi di Indonesia segera di jalankan sesuai aturan sehingga diakui oleh FIFA (<http://radarsukabumi.com>).

Hal yang sama juga dilakukan oleh supporter Sriwijaya FC atau yang biasa disebut dengan Singa Mania yang melakukan aksi damai di simpang 5 DPRD Sumatra Selatan. Mereka mendesak agar Menpora dapat berdamai dengan PSSI agar pembangunan pesepak-bolaan Indonesia tidak terbengkalai. Singa Mania berharap Menpora dan PSSI berdamai agar liga tidak dihentikan lagi. Selain itu Singa Mania juga mengancam akan melakukan aksi yang lebih besar jika pembekuan oleh PSSI belum dicabut oleh Menpora (www.goal.com). Demo menuntut menpora untuk mencabut pembekuan juga terjadi di Malang, supporter klub Arema Cronus yaitu Aremania juga melakukan aksi di bundaran depan Stasiun Kota Baru, Malang. Aremania memohon kepada Presiden RI Joko Widodo untuk menyelamatkan sepakbola Indonesia, selain itu aremania juga meminta Presiden mengadili Menpora Imam Nahrawi karena dianggap telah membajak sepakbola Indonesia dengan pembekuan (<http://bola.metrotvnews.com>).

Demo yang dilakukan para masyarakat Indonesia yang diwakili oleh supporter kepada pemerintah adalah sebenarnya memiliki tujuan yang sama agar sepakbola Indonesia bisa kembali seperti semula. Pemerintah dan PSSI bisa menemukan jalan keluar dari masalah yang ada dan FIFA bisa mencabut sanksi terhadap Indonesia. Dari adanya kisruh tersebut, kisruh ini di liput oleh media, dan tujuannya adalah untuk disampaikan kepada Pemerintah dan FIFA. Hal ini membuat kegiatan private citizen dengan media memiliki peran terkait pencabutan sanksi.

3. *Communication and Media, Peacemaking Throught Information*

Jalur terakhir yang dilakukan oleh Indonesia adalah melalui komunikasi dan media sebagai wujud perdamaian melalui informasi. Semua orang berhak menyuarakan opininya melalui media cetak, radio, film, sistem elektronik, bahkan seni. Dalam hal ini media menyediakan tempat bagi masyarakat yang ingin berpendapat untuk mengenai masalah sepakbola Indonesia, dalam sebuah video yang dibuat oleh COPA90 yang memiliki judul "Can You Survive Without Football?" (www.youtube.com) yang diunggah diyoutube terlihat jelas masyarakat sangat meraskan dampak dari disanksinya PSSI oleh FIFA, Dalam video yang berdurasi sepuluh menit tersebut terlihat banyak pendapat dari berbagai kalangan yang bersedih akibat disanksinya Indonesia.

Selain pemain dan klub sepakbola yang mengalami kerugian banyak masyarakat kecil yang merasakan kerugian. Pedagang jersey atau baju bola contohnya, di Bandung ketika klub Persib Bandung menang pedagang jersey dapat menjual baju seratus potong lebih namun ketika terkena sanksi mereka tidak dapat menjual satu potong pun. Selain itu seorang pedagang asongan yang berjualan kacang yang saat pertandingan berlangsung juga mengalami penurunan hasil yang sangat besar. Dalam video tersebut juga diperlihatkan kondisi di Bukit Tinggi, Sumatra Barat bahwa hampir semua pria dan wanita menyukai sepakbola, sehingga disanksinya Indonesia oleh FIFA sangat mengecewakan masyarakat di Bukit Tinggi. Masyarakat Bukit Tinggi berharap Indonesia bisa dibebaskan dari sanksi FIFA untuk menimbulkan harapan dan mimpi anak muda tentang sepakbola dapat dikembangkan lagi.

Bahkan seorang masyarakat yang menjadi fans berat dari Persija Jakarta yang ditanya mengenai pendapatnya tentang sepakbola Indonesia sekarang dia merasa sangat sedih karena tidak adanya kompetisi sepakbola di Indonesia, dia menyalahkan Pemerintah karena telah menghancurkan kehidupannya menurutnya sepakbola merupakan sebuah agama yang dia miliki. Video ini sebenarnya memiliki satu tujuan yaitu memperlihatkan kepada Pemerintah Indonesia bahwa banyak sekali masyarakat yang menderita akibat sanksi yang di dapat oleh Indonesia terlepas dari berbagai alasan yang mereka miliki. Dalam video ini hanya ada satu tuntutan utama masyarakat yaitu mereka ingin sepakbola Indonesia bisa kembali seperti semula. Dengan adanya media ini membantu menjadi jembatan untuk komunikasi antara pemerintah dan masyarakat agar pemerintah bisa segera mencabut pembekuan dan membuat Indonesia terbebas dari sanksi FIFA. Lebih lanjut media juga ingin memperlihatkan kepada FIFA bahwa masyarakat Indonesia butuh sepakbola.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Pengaruh dari PSSI yang tidak mendengarkan saran dari BOPI dan tidak merespon teguran dari Menpora mengakibatkan dibekukannya PSSI oleh pemerintah Indonesia melalui Menpora. Akibat dari pembekuan yang dilakukan oleh pemerintah kepada PSSI menyebabkan disanksinya Indonesia oleh FIFA. Indonesia mendapatkan sanksi dari FIFA dikarenakan Indonesia melanggar statuta FIFA pasal 13 dan pasal 17 yang berbunyi bahwa setiap anggota FIFA harus menyelesaikan masalah internal secara independent atau dengan kata lain harus mampu menyelesaikan masalah internal tanpa campur tangan pihak ketiga. Hal tersebut menyebabkan FIFA mencabut hak keanggotaan Indonesia dan tidak dapat bertanding atau mengikuti kompetisi di bawah naungan FIFA.

Dalam mengakhiri sanksi yang diberikan FIFA untuk Indonesia, pemerintah Indonesia akhirnya menggunakan multi-track diplomasi untuk membuat Indonesia mendapatkan hak keanggotaannya lagi yaitu Indonesia kembali menjadi anggota FIFA. Diplomasi yang dilakukan Indonesia antara lain adalah melakukan pertemuan antara presiden Indonesia dengan delegasi FIFA dan AFC, selain itu diplomasi yang kedua ialah menpora Imam Nahrawi mengirim surat kepada presiden FIFA yang baru dipilih dalam rangka mengucapkan selamat atas terpilihnya sebagai presiden FIFA dan membahas tentang komitmen Indonesia dalam memperkuat hubungan antara Indonesia dan FIFA. Terakhir pemerintah mengirimkan tim khusus yang memiliki kredibilitas dalam bidangnya untuk bertemu langsung dengan presiden FIFA untuk membahas tentang dicabutnya pembekuan oleh pemerintah yang diberikan kepada PSSI sehingga pencabutan sanksi yang diberikan FIFA kepada Indonesia bisa segera dicabut. Selain dari pemerintah, private citizen dan media juga berperan penting dalam dicabutnya sanksi FIFA karena protes dan demo yang dilakukan private citizen dan dibantu oleh media dapat di dengar oleh pemerintah dan FIFA bahwa masyarakat Indonesia sangat menginginkan sepakbola Indonesia bisa kembali lagi dan kompetisi bisa berjalan lagi.

Saran

1. Pemerintah yang memiliki otoritas dalam suatu negara seharusnya memberikan teguran keras kepada PSSI jika tidak mendengarkan saran yang diberikan oleh pemerintah dan tidak mencampuri urusan sepakbola terlalu dalam hingga membekukan PSSI. Pemerintah juga sebaiknya tahu akibat dari pembekuan yang diberikan kepada PSSI dan seharusnya memperhitungkan masyarakat sekitar yang merasakan dampak dari tidak berjalannya kompetisi sepakbola di Indonesia bukan hanya ingin mengikuti kemauan pemerintah namun mengorbankan masyarakat Indonesia. Karena banyak masyarakat Indonesia yang bergantung dan membutuhkan sepakbola yang ada di Indonesia.
2. PSSI sebagai organisasi sepakbola Indonesia tertinggi sebaiknya merespon surat yang diberikan oleh pemerintah agar pemerintah tidak terlalu ikut campur tangan dalam masalah PSSI dan membekukan PSSI. PSSI juga seharusnya bersifat transparan dan membangun sepakbola yang bersih tanpa korupsi, perngaturan skor dan skandal lainnya agar pemerintah Indonesia juga percaya terhadap pada organisasi sepakbola tertinggi di Indonesia tersebut. Serta dalam pemilihan ketua

umum PSSI harus yang memiliki kredibilitas sehingga tidak terjadi lagi kasus-kasus atau skandal yang malah dilakukan oleh ketua umum PSSI sendiri yang membuat citra sepakbola Indonesia menjadi buruk di mata Internasional.

3. FIFA sebagai organisasi sepakbola internasional seharusnya lebih mengetahui keadaan dan kondisi sepakbola di setiap negaranya, karena di Indonesia masih banyak kasus dan skandal sepakbola yang tidak diketahui oleh FIFA. FIFA juga sebaiknya harus memiliki tim yang dapat berkomunikasi langsung dengan pemerintah sebuah negara dan berdiskusi tentang sepakbola di negara tersebut, karena pemerintah yang dapat mengamati secara langsung perkembangan sepakbola di negara tersebut. Sehingga tidak ada lagi pemerintah yang ikut campur tangan dalam masalah internal sepakbola di negaranya dan sanksi terhadap organisasi sepakbola tertinggi tidak terjadi lagi dan tidak menyebabkan kerugian diberbagai pihak.

Referensi

Buku/Jurnal

Diamond, Lousie dan McDonald, John. 1996. *Multi-Track Diplomacy: A System Approach to Peace*. New York, Kumarian Press.

Hidayat, Muhammad Nizar, 2015. *Interdependence Jurnal Hubungan Internasional FIFA, Global Governance and Cosmopolitanism*, Samarinda, Universitas Mulawarman.

Isharuddin, Dede, 2008, *Drama Itu bernama Sepakbola: Gambaran Silang Olahraga, Politik dan Budaya*, Jakarta, PT Elex Media Komptindo.

Internet

7 Dampak Sanksi FIFA bagi Indonesia, <https://m.tempo.co/read/news/2015/06/04/099671988/7-dampak-sanksi-fifa-bagi-indonesia> Kronologi Kisruh Sepak Bola Nasional Hingga PSSI Dibekukan, <http://bola.liputan6.com/read/2216005/kronologi-kisruh-sepak-bola-nasional-hingga-pssi-dibekukan?p=1>

Agum Gumelar dan Erick Thohir Sudah Bertemu FIFA Ini Yang Bahas, <http://superball.tribunnews.com/2016/04/27/agum-gumelar-dan-erick-thohir-sudah-bertemu-fifa-ini-yang-dibahas>

Can You Survive Without Footbal ? tersedia di https://www.youtube.com/watch?v=-UxpwsGAU_Y

Erick Thohir dan Agum Gumelar Bertemu Bos FIFA Ini Hasilnya <http://bolaindo.com/2016/04/28/erick-thohir-dan-agum-gumelar-bertemu-bos-fifa-ini-hasilnya/comment-page-1/>

Ini Empat Hasil Pertemuan Presiden Jokowi Dengan FIFA, <https://m.tempo.co/read/news/2015/11/02/099715270/ini-empat-hasil-pertemuan-presiden-jokowi-dengan-fifa>

Ini Yang Akan Disampaikan Kemenpora dalam Suratnya ke FIFA
<http://www.goal.com/id-ID/news/1387/nasional/2016/02/29/20833302/ini-yang-akan-disampaikan-kemenpora-dalam-suratnya-ke-fifa>

Jangan Renggut Hiburan Kami, <http://radarsukabumi.com/2015/06/05/jangan-renggut-hiburan-kami/>

Kemenpora Siap Kirim Surat Untuk Presiden Baru FIFA, <http://www.goal.com/id-ID/news/1387/nasional/2016/02/27/20763682/kemenpora-siap-kirim-surat-untuk-presiden-baru-fifa>

Lolosnya Nurdin Halid di Nilai Absurt, <http://sport.detik.com/sepakbola/liga-indonesia/1574389/lolosnya-nurdin-halid-dinilai-absurd>

Pernyataan FIFA AFC Pertemuan dengan Jokowi Produktif,
<http://www.cnnindonesia.com/olahraga/20151102210640-142-89029/ Pernyataan-fifa-afc-pertemuan-dengan-jokowi-produktif/PSSI Ajak Menpora Berdamai>, <http://www.beritasatu.com/sepakbola/291180-pssi-ajak-menpora-berdamai.html>

PSSI Menpora Berdamai Indoensia Terhindar Sanksi FIFA,
<http://bola.metrotvnews.com/read/2015/05/25/399175/pssi-menpora-berdamai-indonesia-terhindar-sanksi-fifa>

SANKSI FIFA Inilah Negara – Negara yang Pernah Dihukum FIFA,
<http://www.solopos.com/2015/05/31/sanksi-fifa-inilah-negara-negara-yang-pernah-dihukum-fifa-609706>

Sejarah Kompetisi Sepak Bola Indoensia, <http://www.viva.co.id/bola/read/243398-sejarah-kompetisi-sepak-bola-indonesia>

Sejarah PSSI <http://www.pssi.or.id/dev/page/detail/5/Sejarah-PSSI>

Terbang Ke Swiss Kemenpora Bujuk FIFA Agar Lolos Sanksi
<https://soccer.sindonews.com/read/1003426/58/terbang-ke-swiss-kemenpora-bujuk-fifa-agar-lolos-sanksi-1432132878>

Terbentuknya FIFA, <http://bola.inilah.com/read/detail/2113868/terbentuknya-fifa>

Usaha PSSI Hindari Sanksi FIFA, <http://bola.inilah.com/read/detail/2203422/usaha-pssi-hindari-sanksi-fifa>